

**PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KAMPAR  
MELALUI LEMBAGA EKONOMI DESA DI DESA BATUSASAK  
KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2010-2012**

**Oleh :**

**Eprizal**

**Eprizal-pekanbaru@yahoo.com/081371515695**

**Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si**

**Raja Muhammad Amin@yahoo.co.id**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293**

**Telp/Facs. 0761 - 63277**

**Abstrak :**

The goals of this research is to analyze and to describe how the Rural Economic Institute in a program of effort empowering people to be independent and prosperous society. In practice, it is not compatible with expectations and Operational Standards and Procedures, because the society has been too spoiled with the assistance pragmatically. Uncovering the weaknesses and constraints in the implementation of the Empowerment Program, this research tries to approach the implementation of government policies that are used to analyze the problems of who you really are instrumental in its implementation.

Empowerment Program is a new format that provides opportunities for people to participate in determining things that can lift their lives. However, the success or failure of the implementation, depending on how the strategy and the involvement of society itself while also monitoring and supervision of the related circles. Based on the analysis, this research is describing that implementation of the Empowerment Program can be seen from the management and effectiveness of the program.

**Keywords : Policy , Empowerment , Democracy.**

**PENDAHULUAN**

Upaya mendorong masyarakat agar terlepas dari belenggu kemiskinan bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab kondisi kemiskinan itu sendiri berdampak pada prilaku dan semangat dalam menjalani hidupnya. Oleh sebab itu upaya menyadarkan masyarakat miskin dan memberikan keyakinan kepada mereka bahwa mereka juga dapat menikmati kehidupan yang layak perlu dilakukan. Upaya-upaya yang

dilakukan pada akhirnya diharapkan akan memacu perubahan dalam masyarakat yang tergantung pada bantuan-bantuan, menjadi mandiri dalam berusaha dan meningkatkan kesejahteraannya agar dapat bersinergi dengan sesama lingkungannya dalam suasana kesalingtergantungan.

Dalam konsep pembangunan ekonomi yang berwawasan kerakyatan peran lembaga keuangan di pedesaan sebagai salah satu piranti untuk

memberdayakan masyarakat kecil dan mengentaskan kemiskinan menjadi sangat penting. Karena diperlukan suatu sistem kredit yang diharapkan dapat menjangkau masyarakat kecil dan miskin dalam memenuhi dan melayani kebutuhan permodalan masyarakat di pelosok pedesaan secara nyata dan mampu menyesuaikan diri dengan tingkat kemajuan masyarakat desa umumnya untuk mengembangkan usahanya.

Atas dasar pemikiran tersebut diperlukan upaya pengembangan potensi dan sumber daya masyarakat agar dapat bersaing secara adil dan tanpa ketergantungan dan keberpihakan pada mereka yang lemah. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hukum rimba, yang mengakibatkan pola hubungan antar kelompok yang tidak setara dan tidak adil di masyarakat. Pemberian perlindungan (*protecting*) dimaksudkan agar mereka yang lemah mampu bersaing secara seimbang serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara sesama di tengah-tengah masyarakat.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampar (PEMK) adalah satu bentuk program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sumber daya serta mengembangkan sikap hidup yang positif dan produktif melalui kelembagaan kelompok usaha ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal dan partisipasi masyarakat. Dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampar (PEMK) upaya memperkuat penguasaan masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan akses

modal. Sebab bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sumber kemajuan ekonomi merupakan barang langka dan kendala utama bagi keberdayaan mereka. Kecilnya modal, rendahnya penguasaan teknologi, sempitnya peluang dan kesempatan kerja dan tidak dikuasainya akses pasar sering menjadi penyebab utama ketergantungan dan ketertinggalan masyarakat lapisan bawah. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampar adalah program pembangunan yang sarat dengan muatan pemberdayaan masyarakat. Ini sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 39 Tahun 2008 tentang pola pemberdayaan usaha masyarakat miskin Kabupaten Kampar. Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang diikuti oleh kemajuan pola pikir masyarakat menuju masyarakat sejahtera mandiri melalui Lembaga Ekonomi Desa (LED).

Kegiatan	Program
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampar dimulai pada Januari 2010 dan akan berakhir secara keseluruhan pada Desember 2014 dengan target lokasi meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Kampar. Adapun tujuan dilaksanakannya	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampar adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Kampar, melalui pemberdayaan masyarakat dengan <i>performance</i> meningkatnya taraf hidup ( <i>livelihood</i> ) yang diikuti oleh kemajuan pola pikir ( <i>mindset</i> ) masyarakat miskin menuju masyarakat sejahtera mandiri melalui tahapan program pendampingan masyarakat yang merupakan kegiatan lanjutan dari penyusunan pola pengembangan komunitas melalui peningkatan sumber penghasilan dengan wujud

peningkatan ragam usaha masyarakat miskin Kabupaten Kampar yang telah disusun pada Tahun Anggaran 2008.

### Tinjauan Teori

Dalam pandangan Wibawa (1994 : 5) pelaksanaan suatu kebijakan atau program merupakan implementasi kebijakan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak yang dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak yang diharapkan (*intended*) maupun dampak yang tidak diharapkan (*negatif effects*).

Pendapat di atas menjelaskan bahwa untuk dapat mengimplementasikan program secara sempurna tidaklah sederhana yang dibayangkan, akan tetapi masih dihadapkan pada berbagai kesukaran-kesukaran seperti kesukaran teknis, perilaku sasaran, kejelasan alokasi sumber daya, koordinasi, kondisi ekonomi, politik dan sosial. Kesukaran tersebut merupakan penghambat yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi program, akibatnya program tidak terlaksana.

Edwards III (dalam M. Steers, 1980 : 74), menyebutkan 4 faktor krusial dalam melaksanakan suatu kebijakan, yakni :

#### 1. Komunikasi (*communication*)

Persyaratan dalam pelaksanaan yang efektif adalah bahwa yang melaksanakan tugas tersebut mengetahui apa yang harus mereka

lakukan. Selanjutnya dalam komunikasi ini perlu adanya konsistensi dari apa yang harus dilakukan, artinya tidak ada pertentangan antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya.

#### 2. Sumber-sumber (*Resources*)

Sumber-sumber yang penting dalam suatu pelaksanaan meliputi staf-staf dengan keahlian yang baik dan kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan termasuk dalam penerapan sanksi jika ada pelanggaran.

#### 3. Kecendrungan-kecendrungan (*Disposition*)

Kecendrungan-kecendrungan erat kaitannya dengan tingkah laku dan menyangkut dengan cara pandang terhadap sesuatu hal atau kebijaksanaan.

#### 4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur Birokrasi menyangkut prosedur-prosedur kerja dan frakmentasi. Frakmentasi muncul secara eksternal yakni respon dari orang-orang atau badan di luar mereka yang mencoba mempengaruhi struktur formal mereka.

### Perumusan Masalah

Dengan adanya uluran tangan dari Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar melalui Lembaga Ekonomi Desa dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat kampar sebagai suatu lembaga keuangan di pedesaan perlu didukung melalui partisipasi aktif masyarakat dengan memanfaatkan dana yang tersedia untuk mengembangkan usaha-usaha ekonomi masyarakat.

Kegiatan-kegiatan produksi masyarakat tersebut akan berkembang dengan baik apabila pengelola usaha

terus berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu melakukan hubungan kerja dengan lembaga-lembaga lainnya di dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usahanya. Setelah lembaga ini berjalan perlu adanya tindakan evaluatif bagi penentuan tingkat keberhasilan kerja program ini, sehingga permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kamar melalui Lembaga Ekonomi Desa di Desa Batusasak Kecamatan Kamar Kiri Hulu Tahun 2010-2012?
2. Apakah Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kamar melalui Lembaga Ekonomi Desa telah efektif dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kamar melalui Lembaga Ekonomi Desa di Kecamatan Kamar Kiri Hulu Tahun 2010-2012.
- b. Untuk menganalisis hambatan-hambatan pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kamar melalui Lembaga Ekonomi Desa dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Kamar untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Kamar Kiri Hulu.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kecamatan Kamar Kiri Hulu, dengan fokus perhatian ditujukan pada Lembaga Ekonomi Desa Teguh Karya Desa Batusasak.

### **Informan Penelitian**

Responden penelitian sebagai subyek penelitian didasarkan keterlibatan langsung informan dalam objek penelitian dalam pelaksanaan program. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kamar, Kepala Desa (Kades) Desa Batusasak, Tenaga Pendamping Lapangan (TPL), Pengurus Lembaga Ekonomi Desa Batusasak, dan Pengurus Kelompok Usaha Bersama Penerima bantuan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kamar Desa Batusasak.

### **Metoda Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian pengumpulan data dilakukan melalui cara-cara berupa :

- 1) Data Primer (data asli) diperoleh melalui cara-cara sebagai berikut :
  - (1) Teknik observasi (pengamatan), yaitu pengumpulan data melalui pencatatan secara cermat dan langsung di lokasi obyek penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kamar (PEMK).
  - (2) Teknik Wawancara, yaitu cara pengumpulan data melalui tanya jawab secara mendalam dengan informan yang terkait langsung dan mengetahui serta memahami obyek penelitian.

2) Data Sekunder (data tersedia) diperoleh melalui cara-cara sebagai berikut :

- (1) Mengumpulkan bahan-bahan laporan atau dokumentasi yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- (2) Penelaan Literatur, yaitu dengan membaca atau mempelajari buku-buku teks, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaannya dan sebagainya.

### Analisis Data

Pengelolaan data dilakukan dengan deskriptif analisis dan analisisnya dilakukan dengan cara kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif data yang diperoleh akan digambarkan dengan menggunakan interpretasi data dan disajikan dalam bentuk tabulasi atau tabel guna untuk mempermudah pemahaman.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Program

Untuk melihat sejauh mana tentang pelaksanaan atau implementasi dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampar melalui Lembaga Ekonomi Desa di Desa Batusasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, dalam hal ini Penulis melihat dari beberapa indikator, yakni : Sosialisasi Program, Proses Seleksi atau Verifikasi, Penetapan Penerima Program, Proses Pencairan Dana, Proses Pengembalian Dana dan Peranan Tenaga Pendamping Lapangan. Indikator tersebut dinilai secara langsung oleh Responden sekaligus masyarakat Penerima bantuan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampar di Desa Batusasak melalui wawancara Penulis dengan mereka.

Untuk mengetahui implementasi dari keseluruhan indikator tersebut di atas diperlukan rekapitulasi hasil penelitian seperti yang tertera dalam tabel berikut ini :  
Tabel Rekapitulasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampar melalui Lembaga Ekonomi Desa di Desa Batusasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

No	Indikator Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Sosialisasi	15 (37,50)	20 (50,00)	5 (12,50)	40 (100,00)
2	Verifikasi Usulan	20 (50,00)	15 (37,50)	5 (12,50)	40 (100,00)
3	Penetapan Penerima	15 (37,50)	20 (50,00)	5 (12,50)	40 (100,00)
4	Pencairan Dana	25 (62,50)	10 (25,00)	5 (12,50)	40 (100,00)
5	Pengembalian Dana	15 (37,50)	22 (55,00)	3 (7,50)	40 (100,00)
6	Peranan TPL	10 (25,00)	23 (57,50)	7 (17,50)	40 (100,00)
Jumlah		100 (250,00)	100 (275,00)	30 (75,00)	240 (600,00)
Rata-rata		17	18	5	40
Persentase (%)		42,00	46,00	12,00	100,00

**Sumber : Data Olahan Penelitian, 2013.**

Berdasarkan hasil olah data yang terdapat pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampar melalui Lembaga Ekonomi Desa di Desa Batusasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar berjalan cukup baik, meskipun sebagian masyarakat masih kurang puas dengan pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar melalui Tenaga Pendamping Lapangan belum berjalan secara maksimal, namun pada umumnya masyarakat penerima bantuan Program tersebut merasa sangat terbantu dan dalam pelaksanaannya tidak terlalu sulit.

### **Efektifitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan**

Keberhasilan suatu program diimplementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya. Dalam mengoperasionalkan program terdapat tiga pilar penting antara lain: organisasi, interpretasi dan penerapan program. Untuk mencapai tujuan implementasi program secara efektif, pemerintah harus melakukan tindakan berupa penghimpunan sumber dana dan pengelolaan sumber daya yang ada. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut dalam mengimplementasikan kegiatan, maka diuraikan sebagai berikut :

1. Struktur Pengelola Lembaga Ekonomi Desa yang kurang efisien

Faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu organisasi dalam implementasi program adalah efektifitas perorangan, dengan perkataan lain bila setiap anggota terkoordinir melakukan tugas dan pekerjaannya dengan baik, maka efektifitas organisasi secara

keseluruhan akan tercapai. Terdapat tiga kriteria keefektifan yang dipakai dalam mengukur efektifitas organisasi, yaitu : kemampuan menyesuaikan diri, produktifitas kerja dan kepuasan kerja. Tingkat efektifitas organisasi dalam penelitian ini adalah sejauh mana kemampuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan Program melalui Lembaga Ekonomi Desa di Kabupaten Kampar khususnya di Desa Batusasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

Faktor selanjutnya adalah kurangnya sumber daya yang berkualitas sebagai unsur yang terpenting dalam implementasi Program agar dapat mencapai sasaran dan tujuan secara efektif. Sumber daya yang berkualitas dalam hal ini adalah dalam artian memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Efektifitas pelaksanaan suatu program pemberdayaan masyarakat adalah bahwa mereka yang menerapkan keputusan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Selanjutnya dalam organisasi sumber daya manusia merupakan unsur yang terpenting sebagai pelaksana program agar dapat tercapai sasaran dan tujuan yang efektif.

2. Minimnya keterlibatan Pelaksana Teknis dalam Pembinaan terhadap Pelaku Kegiatan

Kemampuan menginterpretasikan dalam suatu organisasi adalah kemampuan personalia yang terlibat dalam struktur organisasi. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar adalah dalam menginterpretasikan petunjuk implementasi kegiatan melalui Lembaga Ekonomi Desa. Berdasarkan hasil penelitian ini interpretasi program yang dilaksanakan oleh Badan



Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar terkendala oleh minimnya keterlibatan dari pelaksana teknis terhadap Lembaga Ekonomi Desa dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) di lapangan seperti Tenaga Pendamping Lapangan yang hanya mendampingi secara standar bukan maksimal. Interpretasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat terkadang kurang dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan petunjuk implementasi yang ada dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) akibat pelaksana pembuat kebijakan kurang memahami persoalan di lapangan seperti keterlibatan pihak Kecamatan dalam mensukseskan program ini.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Setelah melakukan kajian tentang pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampar melalui Lembaga Ekonomi Desa di Desa Batusasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat merupakan wujud Otonomi Daerah yang mengedepankan prinsip Keterbukaan dan Demokratisasi. Kelebihan dari program ini adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertindak dan berkarya berdasarkan sumber daya yang mereka miliki secara bersama-sama.
2. Setiap *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan harusnya memahami tugas dan tanggungjawab mereka dalam mengembangkan usaha masyarakat, terutama dalam hal pembinaan agar program tersebut berhasil dan bernilai guna.

3. Pembinaan harusnya dilakukan secara berkesinambungan baik secara kelembagaan ataupun secara personal terhadap Pemanfaat Program, agar keberdayaan yang diharapkan dapat terwujud sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur program sehingga dapat mengangkat taraf hidup masyarakat miskin di pedesaan.

### **Saran-saran**

Adapun saran-saran Penulis tujukan kepada *stakeholders* Program, Pemerintah Kabupaten Kampar, dan peneliti tentang Pemberdayaan Masyarakat agar bisa mengungkap hal-hal yang belum jelas dalam pelaksanaan program :

1. Meskipun Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampar merupakan suatu program unggulan, namun apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan tuntutan dan kehendak masyarakat tidak akan berhasil, terutama dalam hal pembinaan moral dan sikap masyarakat terhadap suatu program.
2. Hendaknya suatu Program betul-betul menyentuh masyarakat yang membutuhkan, agar program yang dijalankan tepat sasaran.
3. Para pihak berkepentingan, Pemerintah dan Tenaga Pendamping Lapangan, juga Pengurus Lembaga Ekonomi Desa diharapkan mampu melaksanakan pembinaan dan melihat secara nyata apa yang menjadi kendala masyarakat dalam mengembangkan usaha dan kelembagaan yang mereka jalankan.

### **Ucapan Terimakasih**

Tulisan ini telah mampu Penulis selesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari yang lainnya. Dan mudah-mudahan

dukungan dan bantuan itu menjadi bekal kebaikan tersendiri bagi mereka di sisi Allah SWT. Sebab itu Penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang begitu dalam kepada :

1. Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau, sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yang dengan segenap tenaga dan pemikirannya memberikan bimbingan dari proposal hingga proses penyelesaian skripsi, Sekretaris Jurusan Auradian Marta, S.IP, M.A, jajaran Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau.
2. Kepada Abah dan Emak yang dengan penuh kesabaran dan kegigihan menanti kelulusan anakmu. Dengan penuh cinta dan kasih sayangnya membesarkan tanpa ragu sedikitpun walau badai sering menerjang dan gelombang membumbung tinggi serta telah dengan penuh mendoakan agar setiap hembusan nafas anakmu bersama-Nya.
3. Kepada kak Resi dan Keluarga di kampung, dengan penuh semangat ikut serta berjuang dalam kelancaran pendidikanku semoga pengorbanan dan ketulusan mereka mendapatkan pahala di sisi-Nya.
4. Kepada saudaraku Devi dan Yudi, kepada kakanda Yenni dan keluarga, buat Drs. Kalayo Hasibuan, M.Ed, yang banyak menginspirasi penulis agar selalu sabar dalam mengarungi kehidupan ini, buat Irwan Syahputra, S.H terimakasih atas semangat yang diberikan, buat sepupuku Abdul Hadi, S.Psi dan Ponakan tersayangku Putri Angraini terimakasih atas

kesediaanmu membantu dan melengkapi data-data yang Penulis butuhkan dalam Penelitian ini, dan seluruh sahabat yang tidak bisa Penulis sebutkan namanya satu-persatu, serta seluruh Civitas Akademika Fisip Universitas Riau, dan yang sangat berharga juga buat seluruh pembaca yang berani membaca karya ini. Mohon maaf atas semua ketidak sempurnaan, semua masukan dan kritik sangat Penulis nantikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Wijaya, 1990, *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali Press, Jakarta.
- Agusthoha, R, Kuswata, 1985, *Manajemen Pembangunan Desa Pedoman Program Terpadu*, Grafindo Utama, Jakarta.
- BPPM Privinsi Riau, 2008, *Pedoman Umum Program Pemberdayaan Desa (PPD)*, BPPM Provinsi Riau.
- Charles O.Jones,1994, *Pengantar Kebijakan Publik*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dairi, Rizal, 2010, *Metodologi Penelitian Berbasis Kompetensi*, UIR Press, Pekanbaru.
- Darjono, 1988, *Partisipasi Masyarakat Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ishak, 2010, *Posisi Politik Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah*, Penaku, Jakarta.
- Ivan Rich dan Donelly, 1987, *Organisasi-Prilaku, Struktur, Proses*, Erlangga, Jakarta.
- Manasse Mallo, *Penelitian Kwantitatif atau Kwalitatif : Bertentangan atau Saling Mengisi*, makalah tidak dipublikasikan.
- Mardikanto Totok dan Soebiato Poerwoko, 2012, *Pemberdayaan Masyarakat : Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Nazir, Moh, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ndraha Taliziduhu, 1991, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bina Aksara, Jakarta.
- Ndraha Taliziduhu, 1997, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ndraha Taliziduhu, 2011, *Kybernologi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Notosemitro, Alex S, 1982, *Partisipasi Masyarakat*, Gunung Agung, Jakarta.
- Richard M.Steers, 1980, *Efektifitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta.
- Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo dan Agus Pramusinto, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wijdaja, HAW, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pemda Kampar, 2011, *Standar Operasional dan Prosedur Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampar*, Bangkinang.
- Peraturan Bupati Kampar, 2009, *Pedoman Umum dan Standar Operasional dan Prosedur Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampar*, Bangkinang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar, 2007, *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar*, Bangkinang.